

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pembahasan utama pada kesimpulan ini berupa inti sari dari hasil penelitian yang dibahas pada bab IV sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab I terkait dengan “Bagaimana Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia?”, pertanyaan umum ini oleh penulis dirincikan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yang diantaranya: *pertama*, bagaimana latar belakang kehidupan Mochtar Kusumaatmadja? *kedua*, bagaimana gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia? *ketiga*, bagaimana peran Mochtar sebelum menjadi Menteri dan setelah menjadi Menteri Luar Negeri dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982)? *keempat*, bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi Mochtar Kusumaatmadja dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982) ? *Kelima*, hal apa saja yang menjadi faktor keberhasilan Mochtar Kusumaatmadja dalam berbagai diplomasi guna mencapai kedaulatan laut Indonesia (1957-1982) ? dan *keenam*, bagaimana Implikasi dari berbagai perjuangan diplomasi yang dilakukan Mochtar Kusumaatmadja terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia?

Mochtar Kusumaatmadja merupakan seorang ahli hukum laut internasional serta menjadi Guru Besar di Universitas Padjajaran, hal ini menjadi modal dirinya bisa menjadi seorang negarawan. Kemampuannya berdiplomasi serta menjadi ahli hukum, mengantarkan Mochtar Kusumaatmadja terpilih menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri pada masa Orde Baru. Prestasi Mochtar menjadi seorang akademisi dan negarawan tidak lepas dari latar belakang kehidupan Mochtar Kusumaatmadja yang hidup dalam keluarga terpandang dan mendapat pendidikan yang cukup. Mochtar Kusumaatmadja yang

Nida Nurhidayati, 2016

**DARI DEKLARASI DJUANDA KE WAWASAN NUSANTARA : PERANAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA
DALAM MENCAPI KEDAULATAN WILAYAH LAUT INDONESIA 1957-1982**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lahir di Jakarta, 17 Februari 1929 merupakan orang berdarah Sunda dari pasangan Mohammad Taslim asal Tasikmalaya dan Sulmini Soerawisastra asal Kuningan. Taslim Kusumaatmadja yang merupakan ayah dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan keturunan dari Bupati di Sukapura, Tasikmalaya. Sedangkan sang ibu Sulmini berasal dari kalangan Pesantren Balerante Cirebon.

Sejak kecil Mochtar Kusumaatmadja diberikan pendidikan yang baik bahkan Mochtar mendapatkan pendidikan sama dengan orang-orang Eropa, hingga ketika dewasa ia memilih untuk masuk Perguruan Tinggi Hukum (FH &IPK) (Universitas Indonesia sekarang) dengan memilih Jurusan Hukum Internasional dan lulus pada tahun 1954, lulus Doktoral lengkap pada tahun 1955 dengan menyanggah gelar *Master in de Rechten* (Mr) yang belakangan diganti menjadi SH. Selesai menempuh pendidikan hukumnya, Mochtar memilih untuk mendalami Hukum Laut Internasional di Yale University Law School, karena Mochtar berpendapat bahwa di Indonesia belum ada ahli hukum laut dan ahli hukum laut akan sangat dibutuhkan oleh Indonesia dengan keadaan wilayahnya yang merupakan wilayah kepulauan.

Setelah selesai menempuh pendidikan hukumnya, Mochtar Kusumaatmadja memulai kariernya sebagai seorang pendidik dengan menjadi Dosen Hukum di beberapa Perguruan Tinggi, meskipun kariernya sebagai seorang pendidik sempat terkendala karena tuduhan yang menyebutkan Mochtar sebagai seorang yang anti Manipol-Usdek pada masa Pemerintahan Soekarno hingga ia harus diberhentikan sebagai pengajar dan pindah ke Amerika, namun pada masa Pemerintahan Soeharto, Mochtar dipercayai menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri sekaligus menangani masalah laut Indonesia.

Gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai wilayah laut Indonesia sebenarnya sudah banyak ia sampaikan pada perkuliahan yang ia berikan, kepercayaan terhadap Mochtar sebagai seorang ahli hukum mulai diberikan pada saat pemerintahan Kabinet Djuanda, dimana pada saat itu ketegangan Indonesia-Belanda meruncing akibat permasalahan Irian Barat yang menyebabkan kapal-kapal Belanda masuk ke wilayah perairan Indonesia, dan pemerintah Indonesia mencari upaya agar wilayah perairan Indonesia terutama Laut Jawa ditutup untuk kapal asing. Pada saat itu, Perdana Menteri Djuanda dibantu oleh beberapa orang

Nida Nurhidayati, 2016

DARI DEKLARASI DJUANDA KE WAWASAN NUSANTARA : PERANAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA DALAM MENCAPI KEDAULATAN WILAYAH LAUT INDONESIA 1957-1982

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

orang-orang kepercayaannya menunjuk Mochtar Kusumaatmadja untuk membuat konsep kewilayah laut Indonesia yang akhirnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Setelah Deklarasi Djuanda, Mochtar Kusumaatmadja terus mengembangkan gagasannya mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia hingga menjadi konsep Wawasan Nusantara yang dijadikan dasar-dasar dalam Garis Besar Haluan Negara.

Pemikiran-pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai batas wilayah laut Indonesia tidak hanya dituangkan dalam berbagai peraturan negara saja, tetapi juga diperjuangkan dalam berbagai Konferensi Laut Internasional dalam rangka memperjuangkan wilayah laut Indonesia. Sebagai seorang diplomat, Mochtar ikut memperjuangkan kedaulatan wilayah Indonesia baik dalam perjanjian bilateral, triteral maupun multilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia dalam menentukan batas-batas wilayahnya, hal penting lainnya adalah keikutsertaan Mochtar dalam Konferensi Hukum Laut Internasional.

Pada Konferensi Hukum Laut Internasional I 1958 dan II 1960 di Jenewa, Mochtar yang saat itu menjadi anggota delegasi Indonesia belum berhasil mendapatkan pengakuan dunia internasional mengenai konsep Wawasan Nusantara yang diperjuangkan delegasi Indonesia. Perjuangan Mochtar Kusumaatmadja menuai hasil, ketika ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI sekaligus menjadi ketua delegasi RI dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III yang berakhir pada 1982. Pada Konferensi ini, delegasi Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan wilayah lautnya, dengan diterimanya konsep Wawasan Nusantara serta diakuinya Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan.

Perjuangan Mochtar Kusumaatmadja berdiplomasi dalam berbagai Konferensi Laut Internasional guna mendapatkan pengakuan kedaulatan wilayah laut Indonesia tidak berjalan mulus begitu saja, berbagai tantangan dihadapi Mochtar Kusumaatmadja secara pribadi, maupun delegasi Indonesia secara umum. Tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri membuat perjuangan yang dilakukan Mochtar Kusumaatmadja dan delegasi Indonesia lainnya menjadi terhambat dan menyebabkan gagalnya delegasi Indonesia dalam

memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut I 1958 dan Konferensi Hukum Laut II 1960 di Jenewa.

Setelah gagalnya usaha Mochtar Kusumaatmadja dan delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I dan II, pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan baru didapatkan pada Konferensi Hukum Internasional III PBB 1982. Pada Konferensi ini, Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus ketua delegasi Indonesia berhasil meyakinkan peserta konferensi untuk menerima konsep Wawasan Nusantara sekaligus mengakui kedaulatan wilayah laut Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan. Hukum Laut 1982 ini tidak lepas dari dukungan dari pemerintah, terutama dalam penentuan kebijakan politik luar negeri khususnya pada masa Orde Baru membuka peluang diterimanya konsepsi Wawasan Nusantara yang diperjuangkan delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III 1982 tersebut.

Diterimanya konsepsi Wawasan Nusantara dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III 1982 menjadikan dampak yang besar bagi Indonesia, termasuk dalam aspek politik, ekonomi, pertahanan serta keamanan. Berbagai keuntungan didapatkan Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam aspek politik, diterimanya konsepsi Wawasan Nusantara dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III 1982 ini merupakan wujud persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Pada aspek ekonomi, pengakuan akan wilayah laut yang luas dengan kekayaan yang melimpah, menjadikan laut Indonesia dapat dijadikan sebagai ladang kekayaan untuk mendorong pembangunan Indonesia. Dengan disetujuinya peraturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diatur memiliki lebar sampai 200 mil laut membuat wilayah bertambah luas dan Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah ZEE tersebut. Selain aspek politik dan ekonomi dalam aspek pertahanan dan keamanan diterimanya konsepsi Wawasan Nusantara dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III 1982 sebagai kesatuan ekonomi, politik, dan sosial dapat mengembangkan dan meningkatkan ketahanan nasional yang ingin dicapai. Lebih jauh hal ini diharapkan sebagai salah satu faktor yang dapat menunjang ketahanan regional bagi kawasan Asia Tenggara.

Perjuangan Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia sangat berdampak besar bagi Indonesia, selain sebagai ciri

Nida Nurhidayati, 2016

DARI DEKLARASI DJUANDA KE WAWASAN NUSANTARA : PERANAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA DALAM MENCAPI KEDAULATAN WILAYAH LAUT INDONESIA 1957-1982

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terwujudnya persatuan dan kesatuan, dampak positif yang dirasakan Indonesia dari tercapainya kedaulatan wilayah laut Indonesia merupakan hasil perjuangan diplomatik para delegasi selama beberapa puluh tahun.

Berbagai gagasan Mochtar Kusumaatmadja mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia dari Deklarasi Djuanda yang akhirnya disusun dalam sebuah konsepsi Wawasan Nusantara dan diperjuangkan dalam berbagai Konferensi Laut PBB agar mendapat pengakuan dari dunia internasional selama hampir dua puluh lima tahun akhirnya mencapai keberhasilan setelah diterimanya konsepsi Wawasan Nusantara tersebut dalam Konferensi Hukum Laut Internasional PBB III pada tahun 1982. Penandatangan hasil konferensi juga sekaligus menandakan pengakuan dari dunia internasional terhadap Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, meliputi wilayah daratan serta perairan yang luas. Berdasarkan gagasan-gagasan dan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Mochtar Kusumaatmadja, terlihat jelas peran besar Mochtar Kusumaatmadja dalam mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia.

5.2 Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII semester genap kurikulum 2013, pembahasan ini dapat menunjang pembahasan mengenai Indonesia pada masa pemerintahan Demokrasi Liberal dan Terpimpin, khususnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Djuanda. Selain itu juga, konten ini dapat menunjang pembahasan mengenai Indonesia pada masa Orde Baru.
2. Bagi instansi pemerintah, diharapkan untuk kembali mengangkat peranan berbagai tokoh yang banyak memberikan kontribusi baik dalam upaya diplomasi maupun upaya lainnya yang berhubungan dengan kedaulatan wilayah laut Indonesia, mengingat perhatian terhadap laut pada masa sekarang sedang genjar dilaksanakan pemerintahan sekarang.
3. Bagi lembaga terkait yang mengurus masalah kelautan, diharapkan dapat mengangkat potensi yang ada pada laut Indonesia, sehubungan dengan luasnya wilayah laut serta banyaknya potensi kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, faktor pertahanan dan

Nida Nurhidayati, 2016

DARI DEKLARASI DJUANDA KE WAWASAN NUSANTARA : PERANAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA DALAM MENCAPI KEDAULATAN WILAYAH LAUT INDONESIA 1957-1982

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keamanan diwilayah laut juga harus terus ditingkatkan mengingat beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut hingga bisa menjadi seperti sekarang ini.

4. Bagi penelitian selanjutnya, tentunya masih banyak hal yang dapat dikaji terkait dengan sejarah kemaritiman, maupun pembahasan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk tokoh lain yang juga mempunyai peranan besar dalam perjuangan mencapai kedaulatan wilayah laut Indonesia. Karena pengkajian terkait dengan sejarah maritim maupun diplomasi masih minim, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperkaya penulisan mengenai sejarah maritim maupun diplomasi yang ada di Indonesia.

Demikian kesimpulan dan saran yang peneliti tulis sebagai intisari dari penelitian yang penulis lakukan selama ini. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi pendidikan Indonesia dan juga sebagai bahan pembelajaran secara umum.

